

MANAJEMEN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) DI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA INSAN MULIA INFORMATIKA JAKARTA TIMUR

Muhammad Rizal

ABSTRACT

This study aims to address the research problem related to the management of the School Operational Assistance (BOS) program at SMK Swasta Insan Mulia Informatika in East Jakarta. The focus of this research is to examine how the processes of planning, implementation, evaluation, and supervision of BOS funds are carried out in the school and to identify various challenges encountered. This study employs a qualitative descriptive method to provide an in-depth depiction of BOS fund management. Data collection techniques include in-depth interviews, direct observation, and document analysis. Data analysis is conducted using the triangulation method to ensure the validity and reliability of the research findings. This research is based on the theory of public financial management, which emphasizes the importance of transparency, accountability, efficiency, and effectiveness in financial management. Furthermore, the systems theory approach is applied to analyze how various components in BOS fund management—such as planning, implementation, and evaluation—are interconnected. The results of the study indicate that the planning of BOS fund budgets has been conducted in accordance with the funding standards outlined in the BOS technical guidelines and the School Activity and Budget Plan (RKAS). However, challenges such as budget proposals exceeding the allocated limits and delays in budget preparation were identified. In implementation, the recording and reporting of BOS fund usage were generally in line with the technical guidelines, although incidental expenditures outside the RKAS often occurred. Additionally, delays in fund disbursement required school to seek bridging funds to meet urgent needs. Evaluation and supervision of BOS funds were carried out internally by the school and externally by relevant institutions. However, several challenges were observed, including misunderstandings in interpreting the technical guidelines, poor document archiving, and frequent changes in the guidelines that affected management consistency. The study recommends improving school financial management capacity and promoting more efficient, transparent BOS fund management.

Keywords: Management, School Operational Assistance (BOS)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah terkait manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur. Fokus penelitian ini adalah mengkaji bagaimana proses perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengawasan dana BOS dilakukan di sekolah tersebut, serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran yang mendalam mengenai manajemen dana BOS. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait. Analisis data dilakukan metode triangulasi untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil penelitian. Penelitian ini didasarkan pada teori manajemen keuangan publik, yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, pendekatan teori sistem digunakan untuk menganalisis bagaimana berbagai komponen dalam manajemen dana BOS saling berhubungan, seperti perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan anggaran dana BOS telah dilakukan sesuai dengan standar pembiayaan yang tercantum dalam petunjuk teknis (juknis) BOS dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS). Namun, terdapat kendala seperti pengajuan anggaran yang melebihi pagu yang ditetapkan dan keterlambatan dalam penyusunan anggaran. Dalam pelaksanaan,

pencatatan dan pelaporan penggunaan dana BOS umumnya telah sesuai dengan juknis, tetapi sering kali terjadi pengeluaran insidental di luar RKAS. Selain itu, keterlambatan pencairan dana BOS menyebabkan sekolah harus mencari dana talangan untuk menutupi kebutuhan mendesak. Evaluasi dan pengawasan dana BOS dilakukan secara internal oleh pihak sekolah dan eksternal oleh instansi terkait. Namun, beberapa kendala yang ditemukan meliputi kesalahpahaman dalam interpretasi juknis, pengarsipan dokumen yang kurang tertib, serta perubahan juknis yang sering terjadi sehingga memengaruhi konsistensi pengelolaan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas manajemen keuangan sekolah, sesuai dengan prinsip teori manajemen keuangan publik, dan mendorong efisiensi dalam pengelolaan dana BOS agar lebih optimal dan transparan.

Kata Kunci: Manajemen, Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan suatu kegiatan yang secara sadar dan disengaja, serta penuh tanggung jawab dilakukan orang dewasa kepada anak sehingga timbul interaksi dari keduanya agar anak dewasa dan berlangsung terus menerus semenjak dilahirkan sampai meninggal. Dengan pendidikan diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab serta mampu melalui masa depan. (Dermawan, 2016: 219)

Pendidikan dalam kaitannya dengan manusia sebagai pribadi dan sebagai anggota masyarakat adalah upaya pengembangan kepribadian agar mampu memenuhi kebutuhan pribadi dan menyumbangkan kemampuannya untuk masyarakat. Untuk menyelenggarakan pendidikan, pemerintah perlu menetapkan serangkaian kebijakan pendidikan. Ada tiga pilar kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan yaitu : 1) Perluasan dan pemerataan akses pendidikan, 2) Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing, 3) Tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. (Tilaar dan Nugroho, 2018: 28)

Manajemen keuangan sekolah merupakan salah satu bidang garapan substansi administrasi pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan digunakan oleh kepala sekolah. Manajemen

keuangan sekolah tidak hanya terkait dengan pengelolaan sumber dana pendidikan yang digunakan untuk proses pendidikan, tetapi juga terkait dengan berbagai permasalahan (resiko) tentang pengelolaan keuangan sekolah serta upaya sekolah untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kelangsungan organisasinya.

Sekolah memerlukan anggaran pendidikan yang besar, terutama untuk aktivitas pembangunan dan pemeliharaan gedung sekolah, pengadaan peralatan dan perlengkapan sekolah, serta aktivitas pembiayaan operasional sekolah. Aktivitas- aktivitas sekolah tersebut akan terganggu apabila tidak didukung dengan anggaran pendidikan yang memadai. Semakin besar anggaran pendidikan, maka diperkirakan akan semakin meningkatkan kualitas pendidikan.

Pembiayaan pendidikan hendaknya dilakukan secara efisien. Makin efisien suatu sistem pendidikan, semakin kecil dana yang diperlukan untuk pencapaian tujuan-tujuan pendidikan. Jika sistem keuangan sekolah dikelola secara baik, maka akan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pendidikan. Dengan anggaran yang tersedia, maka dapat mencapai tujuan-tujuan pendidikan secara produktif, efektif, efisien, dan relevan antara kebutuhan di bidang pendidikan dengan pembangunan masyarakat.

Untuk mencapai hal-hal seperti di atas maka diperlukan adanya proses merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan melaporkan kegiatan bidang keuangan agar tujuan sekolah dapat tercapai secara efektif dan efisien.

Melalui kegiatan manajemen keuangan maka kebutuhan pendanaan kegiatan sekolah dapat direncanakan, diupayakan pengadaannya, dibukukan secara transparan, dan digunakan untuk membiayai pelaksanaan program sekolah secara efektif dan efisien. Untuk itu tujuan manajemen keuangan sekolah adalah: meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan keuangan sekolah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah, meminimalkan penyalahgunaan anggaran sekolah. (Kadarman dan Yusuf, 2022: 78).

Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dibutuhkan kreativitas kepala sekolah dalam menggali sumber-sumber dana, menempatkan bendaharawan yang menguasai dalam pembukuan dan pertanggung-jawaban keuangan serta memanfaatkannya secara benar sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Perencanaan atau planning sebagaimana dikatakan oleh Luther M.Gulick: "Planning that is working out broad outline the things that need to be done and the methods for doing them to accomplish the purpose set for enterprise". Perencanaan adalah aktivitas atau kegiatan menyusun garis-garis besar yang luas tentang hal-hal yang akan dikerjakan dan cara-cara mengerjakannya untuk mencapai tujuan tertentu.

Perencanaan dapat diartikan sebagai proses penyusunan berbagai keputusan yang akan dilaksanakan pada masa yang

akan datang untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. (Munajat, 2021: 91)

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam menyusun rencana keuangan sekolah sebagai berikut: (1). Perencanaan harus realistis. Perencanaan harus mampu menilai bahwa alternatif yang dipilih sesuai dengan kemampuan sarana/fasilitas, daya/ tenaga, dana, maupun waktu. (2). Perlunya koordinasi dalam perencanaan. Perencanaan harus mampu memperhatikan cakupan dan sarana/ volume kegiatan sekolah yang kompleks. (3). Perencanaan harus berdasarkan pengalaman, pengetahuan, dan intuisi. Pengalaman, pengetahuan, dan intuisi, mampu menganalisa berbagai kemungkinan yang terbaik dalam menyusun perencanaan. (4). Perencanaan harus fleksible (luwes). Perencanaan mampu menyesuaikan dengan segala kemungkinan yang tidak diperhatikan sebelumnya tanpa harus membuat revisi. (5). Perencanaan yang didasarkan penelitian. Perencanaan yang berkualitas perlu didukung suatu data yang lengkap dan akurat melalui suatu penelitian. (6). Perencanaan akan menghindari under dan over planning. Perencanaan yang baik akan menentukan mutu kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan. (Sutarsih, 2021: 27)

Manajemen keuangan sekolah perlu memperhatikan sejumlah prinsip. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Disamping itu prinsip efektivitas juga perlu mendapat penekanan. Berikut ini dibahas masing-masing prinsip tersebut, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi.

Transparansi. Transparan berarti adanya keterbukaan. Transparan di

bidang manajemen berarti adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, bidang manajemen keuangan yang transparan berarti adanya keterbukaan dalam manajemen keuangan lembaga pendidikan, yaitu keterbukaan sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan, dan pertanggungjawabannya harus jelas sehingga bisa memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahuinya. Transparansi keuangan sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan dukungan orang tua, masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan seluruh program pendidikan di sekolah. Disamping itu transparansi dapat menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah, masyarakat, orang tua siswa dan warga sekolah melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.

Beberapa informasi keuangan yang bebas diketahui oleh semua warga sekolah dan orang tua siswa misalnya rencana anggaran pendapatan dan belanja sekolah (RAPBS) bisa ditempel di papan pengumuman di ruang guru atau di depan ruang tata usaha sehingga bagi siapa saja yang membutuhkan informasi itu dapat dengan mudah mendapatkannya. Orang tua siswa bisa mengetahui berapa jumlah uang yang diterima sekolah dari orang tua siswa dan digunakan untuk apa saja uang itu. Perolehan informasi ini menambah kepercayaan orang tua siswa terhadap sekolah. (Manullag, 2020: 123)

Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kondisi seseorang yang dinilai oleh orang lain karena kualitas performannya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya. Akuntabilitas di dalam

manajemen keuangan berarti penggunaan uang sekolah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan dan peraturan yang berlaku maka pihak sekolah membelanjakan uang secara bertanggung jawab. Pertanggungjawaban dapat dilakukan kepada orang tua, masyarakat dan pemerintah.

Ada tiga pilar utama yang menjadi prasyarat terbangunnya akuntabilitas, yaitu (a) Adanya transparansi para penyelenggara sekolah dengan menerima masukan dan mengikutsertakan berbagai komponen dalam mengelola sekolah, (b) Adanya standar kinerja di setiap institusi yang dapat diukur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, (c) Adanya partisipasi untuk saling menciptakan suasana kondusif dalam menciptakan pelayanan masyarakat dengan prosedur yang mudah, biaya yang murah dan pelayanan yang cepat.

Efektivitas. Efektif seringkali diartikan sebagai pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Garner mendefinisikan efektivitas lebih dalam lagi, karena sebenarnya efektivitas tidak berhenti sampai tujuan tercapai tetapi sampai pada kualitatif hasil yang dikaitkan dengan pencapaian visi lembaga. Effectiveness "characterized by qualitative outcomes". Efektivitas lebih menekankan pada kualitatif outcomes. Manajemen pembiayaan dikatakan memenuhi prinsip efektivitas kalau kegiatan yang dilakukan dapat mengatur keuangan untuk membiayai aktivitas dalam rangka mencapai tujuan lembaga yang bersangkutan dan kualitatif outcomes-nya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Efisiensi. Efisiensi berkaitan dengan kuantitas hasil suatu kegiatan. Efficiency

”characterized by quantitative outputs”. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara masukan (input) dan keluaran (out put) atau antara daya dan hasil. Daya yang dimaksud meliputi tenaga, pikiran, waktu, biaya. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua hal: (a). Dilihat dari segi penggunaan waktu, tenaga dan biaya: Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau penggunaan waktu, tenaga dan biaya yang sekecil-kecilnya dapat mencapai hasil yang ditetapkan. (b). Dilihat dari segi hasil. Kegiatan dapat dikatakan efisien kalau dengan penggunaan waktu, tenaga dan biaya tertentu memberikan hasil sebanyak-banyaknya baik kuantitas maupun kualitasnya. (Munajat: 2020:12)

Jika kita melihat tentang konsep keuangan yang diimplementasikan akan ditemui istilah keuangan (finance), anggaran (budget), biaya (cost), pembiayaan (financing). Keuangan (Finance). Keuangan dalam arti luas bagian dari urusan praktis yang berhubungan dengan uang. Anggaran (Budget). Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara kuantitatif dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan lembaga.

Beberapa keuntungan penggunaan anggaran sekolah: (1). Menetapkan suatu penilaian terhadap kegiatan yang direncanakan, (2). Penting bagi pemantapan rencana kerja, (3). Berguna untuk peramalan, pengeluaran dan estimasi pendapatan.

Biaya (Cost). Biaya : seluruh dana baik langsung/tidak langsung yang diperoleh dari berbagai sumber (pemerintah, masyarakat, orang tua) yang diperuntukan untuk penyelenggaraan pendidikan. Perhitungan biaya pendidikan ditentukan oleh komponen kegiatan pendidikan,

meliputi pengadaan sarana dan prasarana pendidikan.

Pembiayaan (Financing). Financing merupakan fungsi penyediaan dana untuk melaksanakan usaha. Begitu juga dengan pengelolaan pendidikan dana merupakan hal yang sangat untuk terlaksananya program pembelajaran. (Danumihardja, 2019: 25-26). Dalam penulisan tesis ini menggunakan kata dasar “keuangan” yang dipergunakan untuk keperluan meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang meliputi Gaji, Umroh, Tunjangan Prestasi, THR, Askes, Dana Pensiun, Bonus Kegiatan dan Bonus Prestasi. Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan di sekolah.

Dengan demikian biaya itu mencakup uang atau dana dan fasilitas- fasilitas yang lain, termasuk sumbangan tenaga, pikiran, dan ide. Di sekolah biaya biasanya tertuang dalam format atau bentuk tertentu, yang ditulis secara cermat dan penuh kehati-hatian.

“Biaya (cost) pendidikan, dikenal pula dengan, anggaran belanja pendidikan (education budget) yang terdiri dari dua komponen, (1) Pendapatan, pemasukan dan penerimaan di satu pihak dan (2) Pengeluaran atau belanja”. (Supriadi, 2018: 4)

Anggaran penerimaan merupakan pendapat yang diperoleh dari setiap tahun oleh sekolah dari berbagai sumber resmi dan diterima secara teratur baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, orang tua murid, sedangkan dana dasar pengeluaran adalah sejumlah uang yang dibelanjakan setiap tahun untuk kepentingan pelaksanaan sekolah. Pengeluaran sekolah dapat dikategorikan

dalam beberapa item pengeluaran, termasuk uang pengeluaran belanja pegawai, pengadaan alat-alat praktek, dan sebagainya.

Dalam manajemen pembiayaan, satu diantara instrumen yang penting adalah penyusunan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS). Penyusunan RKAS mendasari pelaksanaan (akuntansi) dan evaluasi (auditing) program secara transparan, akuntabel dan demokratis. Penyusunan anggaran dan pengembangan RKAS mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya: 1) laju pertumbuhan peserta didik, 2) inflasi, 3) pengembangan program dan perbaikan, 4) proses pengajaran dan pembelajaran.

Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupakan salah satu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan demi terciptanya peningkatan kualitas pendidikan. Sasaran program BOS adalah semua

sekolah SD/SDLB, SMP/SMPLB, dan SMA/SMALB/SMK yang

diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau masyarakat yang telah terdata dalam dapodik dan memenuhi syarat sebagai penerima BOS berdasarkan kriteria yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Berdasarkan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan, "Pasal 22 Besaran Alokasi Dana BOS terdiri atas: a. besaran alokasi Dana BOS Reguler: dan c. besaran alokasi Dana BOS Kinerja. Pasal 23 (1) Besaran alokasi Dana BOS Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dihitung berdasarkan besaran satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. (2) Satuan biaya Dana BOS Reguler pada masing-masing daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain.

Menurut Handoko (2015:3) mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha secara sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja bersama untuk Dengan kata lain, manajemen menitik beratkan pada usaha memanfaatkan orang lain dalam pencapaian tujuan, agar mencapai tujuan tersebut, maka orang-orang didalam instansi harus jelas wewenang, tanggung jawab dan tugas pekerjaannya.

Menurut Robbins (2019:8) mengemukakan bahwa manajemen melibatkan koordinasi dan mengawasi aktivitas kerja lainnya sehingga kegiatan mereka selesai dengan efektif dan efisien. Arti dari efisien itu sendiri adalah mendapatkan hasil output

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Manajemen

Menurut Hasibuan (2016:2) mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengarahan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya.

Menurut Terry (2016:15), mengemukakan bahwa manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, penginstansian, menggerkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui

terbanyak dari input yang seminimal mungkin, sedangkan efektif adalah “melakukan hal yang benar”, yaitu melakukan sebuah pekerjaan yang dapat membantu instansi mencapai tujuannya”.

Sedangkan menurut Hery (2018:1) bahwa manajemen merupakan proses kegiatan pekerjaan secara efisien dan efektif, dengan dan melalui orang lain”. Manajemen tidak hanya mencakup kegiatan untuk mencapai dan memenuhi sasaran instansi, tetapi juga menjalankan kegiatan tersebut dengan efektif dan efisien.

Menurut Abdullah, (2018:2) menyatakan bahwa manajemen adalah keseluruhan aktivitas yang berkenaan dengan melaksanakan pekerjaan instansi melalui fungsi- fungsi perencanaan, penginstansian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan instansi yang sudah ditetapkan dengan bantuan sumber daya instansi (man, money, material, mechine and method) secara efisien dan efektif.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, penginstansian, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dalam instansi yang sudah direncanakan dengan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

a. Pengertian BOS

Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Dana BOSP adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan. Dana Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disebut Dana BOS adalah Dana BOSP untuk operasional Satuan Pendidikan dalam menyelenggarakan pendidikan

dasar dan pendidikan menengah (Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah Dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah sebagai pelaksana program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Tujuan BOS

Secara umum program BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan dalam rangka wajib belajar 12 tahun yang bermutu. Secara khusus program BOS bertujuan untuk:

- 1) membantu biaya operasional sekolah; dan
- 2) meningkatkan aksesibilitas dan mutu pembelajaran bagi peserta didik.

c. Sasaran Program dan Besar Bantuan

Dana BOS terdiri atas dana BOS reguler dan Dana BOS kinerja. Sasaran program BOS reguler adalah Satuan Pendidikan penerima dana BOS reguler meliputi: SD, SDLB, SMP, SMPLB, SMA, SMALB, SLB, dan SMK. Satuan Pendidikan penerima Dana BOS reguler harus memenuhi persyaratan:

- 1) memiliki NPSN yang terdata pada Aplikasi Dapodik;
- 2) telah mengisi dan melakukan pemutakhiran data pada Aplikasi Dapodik sesuai dengan kondisi riil di Satuan Pendidikan paling lambat tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya;
- 3) memiliki izin untuk menyelenggarakan pendidikan bagi Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang terdata pada Aplikasi Dapodik;

- 4) memiliki Rekening Satuan Pendidikan atas nama Satuan Pendidikan;
 - 5) tidak merupakan Satuan Pendidikan kerja sama; dan
 - 6) tidak merupakan Satuan Pendidikan yang dikelola oleh kementerian/lembaga lain. (Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022)
- Besaran alokasi dana BOS reguler dihitung berdasarkan besaran satuan

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan analisis kualitatif. Karena penelitian ini berusaha mengungkapkan gejala yang secara fundamental tergantung pada pengamatan manusia dan kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan peristilahannya, sebagaimana pendapat Kirik dan Miller seperti yang dikutip oleh Moleong. (Moleong, 2022:114-115)

Data yang dikumpulkan dari latar yang dialami (Natural Setting) sebagai sumber data langsung. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan sekaligus mendeskripsikan data secara utuh menyeluruh. Penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus, karena penelitian ini meneliti objek, latar tempat penyimpanan data. Subjek penelitian ini adalah satu, karenanya, sesuai dengan saran Bogdan peneliti menggunakan jenis studi kasus. (Bogdan, 2018: 62)

Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena: Pertama, penelitian ini berusaha menyajikan langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden dengan tujuan supaya lebih peka dalam menyesuaikan diri terhadap pola-pola nilai yang dihadapi ketika di lapangan. Kedua, data dalam penelitian ini

biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah dikalikan dengan jumlah Peserta Didik. Satuan biaya dana BOS reguler pada masing-masing daerah ditetapkan dengan Keputusan Menteri. Peserta Didik merupakan Peserta Didik yang memiliki NISN pada Satuan Pendidikan penerima Dana BOS Reguler berdasarkan data pada Aplikasi Dapodik tanggal 31 Agustus tahun anggaran sebelumnya. (Permendikbud Nomor 63 Tahun 2022)

dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan analisis dokumen. Fakta-fakta dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya ditarik kesimpulan.

Pendekatan deskriptif, datanya merupakan ungkapan kata-kata dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis, hanya menggambarkan suatu gejala atau keadaan yang diteliti secara apa adanya serta diarahkan untuk memaparkan fakta-fakta, kejadian-kejadian secara sistematis dan akurat. (Mulyana, 2021: 155)

Penelitian yang dimaksud untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian di adakan. (Arikunto, 2020: 309) Jadi dalam penelitian ini peneliti berusaha meneliti tentang manajemen Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menguraikan pembahasan hasil penelitian dengan menggunakan dasar teori yang ada berdasarkan subfokus penelitian yaitu (1) Perencanaan Anggaran BOS, (2) Pelaksanaan Anggaran BOS, dan (3) Evaluasi dan pertanggungjawaban Anggaran BOS.

1. Perencanaan Anggaran BOS

Dari hasil temuan di lapangan diketahui bahwa Perencanaan keuangan SMK Swasta Insan Mulia Informatika disusun dengan cara membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS) baik untuk rencana jangka panjang yang termaktub dalam Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) maupun dalam Rencana Jangka pendek yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT).

Penyusunan rencana anggaran diawali dengan identifikasi tujuan setelah mengkaji visi, misi sekolah dan melakukan evaluasi diri sekolah (EDS), selanjutnya pihak sekolah akan mengoleksi program-program yang diajukan oleh para guru, kemudian memilah mana yang prioritas dan mana yang tidak, yang prioritas akan mendapat dukungan moril maupun materil dari pihak sekolah yang kemudian ditetapkan sebagai salah satu program kerja yang ditetapkan dalam RKT dan RKAS, sementara yang belum dijadikan prioritas tetap mendapat suport dan dukungan, akan tetapi pelaksanaannya tidak secara permanen di tetapkan dalam RKAS.

Pada awal tahun pelajaran Para Pembina, pelatih dan guru diminta oleh pihak sekolah untuk mengajukan program kerja yang disertai anggaran kegiatannya. Artinya ada koordinasi yang baik antara manajemen/pengelola keuangan dalam hal ini dana BOS dengan program KBM yang dilakukan oleh guru.

Kemudian dalam penyusunan RKAS ada pengalokasian anggaran berdasarkan skala prioritas. Prioritas utamanya adalah terlaksananya kegiatan utama yaitu pembelajaran mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, remedial dan pengayaan. Selebihnya untuk pengembangan kegiatan

ekstrakurikuler dan penguatan pendidikan karakter. Pengalokasian juga berdasarkan persentase yang telah ditetapkan oleh pemerintah seperti 20 % untuk pembelian buku dan 15 % untuk Gaji atau honor guru dan karyawan sekolah.

Pengelola dana BOS juga membuat perencanaan anggaran yang menjabarkan tujuan dalam tampilan operasional yang dapat di ukur. Tampilan operasional yang dimaksud adalah RKAS, di mana RKAS itu memuat berbagai macam program yang akan dikerjakan, mulai dari yang bersifat harian, bulanan ataupun yang sifatnya jangka panjang kedepan.

Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa perencanaan anggaran keuangan dari Dana BOS SMK Swasta Insan Mulia Informatika telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan manajemen pengelolaan BOS yaitu Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dimana sekolah diberi kebebasan dalam perencanaan dan pengelolaan keuangan walaupun ada beberapa komponen yang sudah ditetapkan prosentase alokasinya oleh pemerintah berdasarkan juknis BOS.

Walaupun demikian pengelola dana BOS SMK Swasta Insan Mulia Informatika tentunya masih banyak menjumpai kendala dalam merencanakan penggunaan anggaran dana BOS, seperti: 1. Besaran anggaran yang diajukan oleh penanggungjawab kegiatan, pelatih dan pembina kegiatan sekolah melampaui pagu anggaran yang ada. Sementara mereka menuntut semua kegiatannya harus berjalan. 2. Kurangnya pro aktif dan keterlambatan guru, pelatih, Pembina dan penanggung jawab dalam menyusun dan menyetorkan anggaran kepada pengelola dana BOS, sementara RKAS sudah harus dikirim ke Dinas Pendidikan Provinsi, akhirnya pengelola BOS sekolah kurang

mengakomodir anggaran kegiatan yang akan mereka laksanakan. Hal inilah yang harus segera dicari solusinya yang terbaik demi kelancaran program sekolah.

2. Pelaksanaan Anggaran BOS

Pelaksanaan kegiatan pembelanjaan anggaran keuangan SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur, berdasarkan temuan di lapangan mengacu pada peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab IX pasal 62 tentang standar pembiayaan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Bantuan Operasional sekolah (BOS) yaitu dalam melaksanakan anggaran dan membelanjakan keuangan pengelola dana BOS melakukan pembukuan dengan mencatat berbagai sumber dana yang masuk beserta jumlahnya, dan distribusi penggunaannya secara rinci serta menyetorkan pajak yang harus dikeluarkan sesuai aturan yang berlaku. Adapun buku yang digunakan dalam mencatat penerimaan dan pengeluaran dana BOS adalah: 1. Buku Kas Umum (BKU) untuk mencatat semua penerimaan dan pengeluaran uang yang meliputi semua transaksi eksternal yang berhubungan dengan pihak ketiga. 2. Buku Kas Pembantu (BKP) untuk mencatat tiap transaksi tunai data terlampir 3. Buku Pembantu Bank (BPB) untuk mencatat tiap transaksi melalui bank, baik cek, giro maupun tunai data terlampir 4. Buku Pembantu Pajak (BPP) untuk mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak data terlampir.

Selain dilakukan pembukuan diatas, kepala sekolah melakukan Opname Kas dan membuat Berita acara pemeriksaan kas yang dilakukan setiap akhir bulan dengan cara menutup BKU diakhir bulan dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara,

Pencatatan penerimaan dana BOS yang dilakukan bendahara SMK Swasta Insan Mulia Informatika adalah dengan cara dana BOS yang masuk ke rekening sekolah ditarik oleh bendahara dan kepala sekolah kemudian dicatat di dalam buku kas umum dan buku kas pembantu BOS. Kemudian baru sekolah dapat membelanjakannya untuk kepentingan kegiatan dan program sekolah sesuai RKAS. Segala pengeluaran keuangan dicatat oleh bendahara di dalam buku kas pembantu secara rinci.

Semua penggunaan dana BOS dilaporkan oleh bendahara kepada kepala sekolah setiap akhir bulan, sebagai bahan untuk membuat laporan pertriwulan yang akan di kirim ke Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta Timur yang disertai bukti-bukti pengeluaran kas dan bukti setor pajak. Selain itu sekolah juga melaporkan penggunaan dana BOS secara online melalui laman Kemendikbud RI. Pelaporan dana BOS tersebut dilakukan pada jadwal yang telah ditentukan sesuai juknis pelaporan dana BOS, yaitu: triwulan 1 dilaporkan pada bulan Maret, triwulan 2 dilaporkan bulan Juni, triwulan 3 dilaporkan pada bulan September dan triwulan 4 dilaporkan bulan Desember.

Dari pembahasan di atas pelaksanaan penggunaan anggaran dana BOS dari mulai penerimaan dan pengeluaran semuanya dicatat dan dilaporkan sesuai juknis penggunaan Dana BOS, dan dalam penggunaan anggaran SMK Swasta Insan Mulia Informatika selalu mengikuti rambu-rambu yang termaktub di dalam juknis bos sebagaimana yang sudah tersusun alokasinya di dalam RKAS. Artinya pengeluaran yang digunakan untuk program sekolah tidak lari dari 11 komponen pembiayaan yang ada dalam juknis BOS. Dengan demikian pelaksanaan dan pengelolaan dana BOS

SMK Swasta Insan Mulia Informatika sudah sesuai prosedur yang berlaku.

Namun diakui oleh Pengelola Dana BOS dalam melaksanakan penggunaan anggaran tidak selalu berjalan mulus sesuai RKAS, karena masih sering menghadapi kendala yang diluar dugaan, seperti 1. Pengeluaran dana BOS insidentil untuk program diluar RKAS, yang tidak dianggarkan sebelumnya di RKAS, hal inilah sulit untuk dilaporkan dan dibukukan karena tidak ada dalam juknis BOS. 2. Pencairan dana BOS yang sering terlambat, sementara kegiatan sekolah harus tetap berjalan, akhirnya sekolah harus berhutang kesana-sini mencari dana talangan. Hal ini yang sering menghambat kelancaran kegiatan sekolah.

3. Evaluasi dan pertanggungjawaban Anggaran BOS

Evaluasi pelaksanaan Anggaran Dana BOS di SMK Swasta Insan Mulia Informatika Jakarta Timur berdasarkan temuan di lapangan dilakukan dengan baik oleh pengelola dana BOS sekolah, Tim Manajemen BOS Provinsi di Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta Timur dan oleh Inspektorat. Evaluasi tersebut dilakukan dengan cara pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan secara periodik dan berkesinambungan, baik evaluasi secara internal oleh pihak pengelola dana BOS dalam hal ini kepala sekolah dan bendahara BOS setiap akhir bulan yang diketahui oleh komite sekolah, juga dilakukan pemeriksaan secara eksternal oleh instansi vertikal di atasnya dalam hal ini Tim Manajemen dana BOS Provinsi, Provinsi dan Inspektorat setiap akhir triwulan dan bahkan ada pengawasan dari masyarakat / LSM.

Evaluasi dan pengawasan ini yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan juknis dan regulasi yang berlaku,

kesesuaian antara hasil yang dicapai dengan perencanaan yang ditetapkan, kendala dan kesulitan yang dihadapi serta untuk mengukur ketepatan pelaksanaan program sesuai waktu yang ditentukan.

Hasil evaluasi dan pengawasan penggunaan dana BOS yang dilakukan oleh internal sekolah, eksternal oleh instansi vertikal, komite dan LSM tersebut dijadikan oleh SMK Swasta Insan Mulia Informatika sebagai rekomendasi untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan penggunaan anggaran BOS di masa yang akan datang.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa evaluasi dan pengawasan anggaran sudah dilakukan dengan baik, secara internal oleh Pengelola dana BOS SMK Swasta Insan Mulia Informatika dan secara eksternal oleh Tim Manajemen BOS Provinsi, inspektorat serta LSM.

Namun demikian pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS tersebut masih sering menjumpai berbagai persoalan, seperti: 1. Kesalahfahaman antara pengelola dana BOS sekolah dengan Tim Manajemen BOS Provinsi serta Inspektorat dalam menafsirkan petunjuk teknis dana BOS, sehingga sering terjadi benturan dan akhirnya jadi bahan temuan pelanggaran penggunaan dana BOS 2. Pengarsipan dokumen laporan pertanggungjawaban BOS yang dilakukan instansi vertikal ke atas kurang baik dan tidak satu atap 3. Kesulitan dalam melaporkan pengeluaran dana BOS yang bukan peruntukannya tetapi itu harus keluar. Khususnya pengeluaran dana kegiatan diluar kegiatan yang sudah dianggarkan dalam di RKAS. 4. Juknis BOS yang hampir setiap tahun berubah-ubah ini juga yang membuat pengelola dana BOS di sekolah kesulitan dalam menguasai

dan memahami juknis tersebut, sehingga sering terjadi kesalahfahaman antara pengelola BOS sekolah dengan pengawas dan pemeriksa laporan BOS Provinsi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa perencanaan anggaran Dana BOS SMK Swasta insan Mulia Informatika telah dilaksanakan oleh pengelola sebagaimana mestinya sesuai standar pembiayaan pendidikan dan petunjuk teknis BOS yang tertuang di dalam RKAS yang disinkronkan dengan Rencana Kerja Sekolah (RKS). Akan tetapi pengelola dana BOS SMK Swasta insan Mulia Informatika masih menjumpai kendala dalam merencanakan penggunaan anggaran dana BOS, seperti: (a) Besaran anggaran yang diajukan oleh penanggungjawab program kegiatan sekolah melampaui pagu anggaran yang ada. (b) Keterlambatan penanggung jawab program kegiatan sekolah dalam menyusun dan menyetorkan anggaran kepada pengelola dana BOS, sehingga tidak terakomodir.

Pelaksanaan penggunaan anggaran dana BOS dari mulai penerimaan dan pengeluaran semuanya dicatat dan dilaporkan sesuai juknis penggunaan Dana BOS, dan dalam penggunaan anggaran SMK Swasta insan Mulia Informatika selalu mengikuti rambu-rambu yang termaktub di dalam juknis bos sebagaimana yang sudah tersusun alokasinya di dalam RKAS. Namun Pengelola Dana BOS masih sering menghadapi kendala, seperti a. Pengeluaran dana BOS insidental untuk program diluar RKAS, yang tidak dianggarkan sebelumnya di RKAS, b. Pencairan dana BOS yang sering terlambat, akhirnya sekolah harus berhutang mencari dana talangan demi kelancaran kegiatan sekolah.

Evaluasi, pertanggung jawaban dan pengawasan anggaran dana BOS sudah dilakukan sesuai dengan standar pengelolaan dana BOS, secara internal oleh Pengelola dana BOS SMK Swasta insan Mulia Informatika dan secara eksternal oleh Tim Manajemen BOS kabupaten, inspektorat setiap akhir triwulan serta ada pengawasan dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM). Namun demikian dalam pelaksanaan evaluasi, pengawasan dan pertanggung jawaban penggunaan dana BOS tersebut masih sering dijumpai berbagai persoalan, seperti: (a) Kesalahpahaman antara pengelola dana BOS sekolah dengan Tim Manajemen BOS Kabupaten serta Inspektorat dalam menafsirkan petunjuk teknis dana BOS, (b) Pengarsipan dokumen laporan pertanggungjawaban BOS yang dilakukan instansi vertikal ke atas kurang baik dan tidak satu atap. (c) Kesulitan dalam melaporkan pengeluaran dana BOS diluar kegiatan yang sudah dianggarkan dalam di RKAS. (d) Juknis BOS yang hampir setiap tahun berubah-ubah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta, 2022
- B. Suryosubroto. Manajemen Pendidikan Sekolah. Jakarta: Rineka Cipta, 2019
- Bray, Mark. Decentralization of Education Community. Washington. DC : The World Bank, 2016
- Clark, D. Hougli, J., Pongtuluran, A., Sembiring, R., Triaswati. Financing of Education in Indonesia. The University of Hong Kong: Asian Development Bank and Comparative Education Center, 2018

- Danin. Analisis Pengendalian Mutu Pendidikan. Bandung: Rosdakarya, 2023 Danumihardja, Mintarsih. Manajemen Keuangan Sekolah: Studi Manajemen Pada SLTP dalam implementasi Otda. Jakarta: Uhamka Press, 2019
- D.C., Winter Mc.Cellan. Motivation Economic Achievment. New York: The Free Press, 2021
- Depdiknas. Buku Panduan Operasional Sekolah, untuk Pendidikan Gratis Dalam Rangka Wajib Belajar 9 Tahun Yang Bermutu. (Jakarta : Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, 2020)
- Depdiknas. KMBI edisi 4 Jakarta : Bahasa Pustaka, 2018
- Departemen Pendidikan Nasional. Manajemen Keuangan, Materi Pelatihan Terpadu untuk Kepala Sekolah. Jakarta, 2022
- Departemen Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur'an, 2019
- Depdiknas Didasmen TK dan SD. Manajemen Berbasis Sekolah untuk Sekolah Dasar. Jakarta: Depdiknas, 2021
- Depdikbud. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2016
- Dermawan, Oki. Partisipasi Wali Murid di Sekolah Dasar (SD) Kuttab Al Fatih Bandar Lampung, jurnal al-idaroh kependidikan islam, Lampung: 2016
- EK, Mochtar Effendy. Manajemen Pendidikan Islam, Jakarta: Bintara, 2016 Gunawan, Imam dan Djum Djum Noor Benty, Manajemen Pendidikan Suatu Pengantar Praktik, Bandung: Alfabeta, 2017
- Hadari, Nawawi. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015
- Halsey, G.D. Bagaimana Memimpin & Mengawasi Pegawai Anda. terjemahan Anaf S. Bagindo & M. Ridwan. Jakarta: Rineka Cipta. 2019
- Hasan, Suad dan Enny Pudjiastuti. Dasar-dasar Manajemen keuangan. Yogyakarta: UUP AMP YKPN, 2018
- Hasibuan, H. Malayu S. P. Manajemen Sumber Daya Manusia. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015
- Husein, Umar, Riset Sumber Daya Manusia Dalam Organisasi, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019
- Husnan, Suad Manajemen Keuangan, Teori dan Penerapan, Yogyakarta: BPFE , 2022
- J Hallak, terj. Harso, Analisis Biaya & Pengeluaran Untuk Pendidikan, Paris: Bharata Karya Aksara, Jakarta dan Unesco, 2020
- Kadarman, A.M. dan Udaya, Yusuf. Pengantar Ilmu Manajemen, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Pt. Gramedia Pustaka Utama, 2022
- Lipham, M. Dan Hoeh, James A. The Principleship, Foundation and Functions. New York: Harver and Row Publisher, 2017
- Lex, Moleong. Metode Penelitian Kualitatif Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2022
- McMahon, W. W, Improving Education Finance in Indonesia, Jakarta: Policy Research Center, Institute for Research and Development, MONE, UNICEF, UNESCO, 2021

- Mangkunegara, Anwar Prabu. Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2019
- Manullang, M. Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2020
- Mardalis. Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta: Bumi Aksara, 2023
- Mulyasa, E. Manajemen Berbasis Sekolah, Strategi dan Implementasi. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019
- Mulyana, Dedy. Metode Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu komunikasi dan ilmu sosial lainnya. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2021
- Nanang Fatah. Ekonomi & Pembiayaan pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020
- Nawawi, Hadari. Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015
- Nur, Munajat. Hand Out Mata Kuliah Administrasi pendidikan. Jakarta: Uhamka Press, 2019
- Pidarta,Made. Perencanaan Pendidikan Partisipatori dengan Pendekatan Sistem.Jakarta: Rineka Cipta, 2020
- R.Agus Sartono. Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: FE UGM, 2021
- Ramayulis. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia, 2018
- Reschovsky, Andrew, and Jennifer Imazeki. Let No Child be Left Behind: Determining the Cost of Improving Student Performance, USA: Public Finance Review, 2023, Vol. 31, No. 3
- Robert C Bogdan, at.al, Qualitative Research For Education: An Introduction to Theory and Methods. London: Allyn and Bacon Inc. 2016
- Robbin dan Coulter.Manajemenedisi kedelapan .Jakarta: PT Indeks, 2017
- Samsudin, Sadili. Manajemen Sumber Daya.Bandung: Pustaka Setia. 2016.
- Sondang Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Asdi Mahasatya, 2022
- Stephen P. Robbins & Mary Coulter,terj. T. Hermya, Management, sixth Edition, Jakarta: PT. Indojoya Multitama, 2019
- Sugiyono, Metode Peneltian Kuantitatif Kualitatif dan R & D. Alfabeta. Bandung, 2017
- Sulistiyorini, Manajemen Pendidikan Islam,Elkaf: Tulungagung, 2016
- Sutarsih, Cicih. Administrasi Keuangan Sekolah. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2023
- Supriyadi, Dedi. Satuan Biaya Pendidikan Dasar dan Menengah, Rujukan bagi penetapan kebijakan Pembiayaan.Jakarta: Rineka Cipta, 2020
- Sutrisno, Hadi. Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 2023
- Timpe, A.D. Memimpin Manusia. Jakarta: Gramedia. 2021
- Woolfolk, Anita E. Educational Psychology for Teachers. Boston: Allyn and Bacon. 2019.